

INTERPRETASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG

Atik Rochaeni

Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

Email: neptura.76@gmail.com

Abstract

The phenomenon of waste management that has not met expectations is caused by the increasing population, the sectoral understanding of the apparatus, and the lack of community participation in waste management. This research aims to examine the interpretation dimension in the implementation of waste management policies. This research is designed based on a qualitative approach with a descriptive analysis method. The data collection techniques are through interviews, observation, literature/documentation studies. The informants are all interested parties, both government officials and other stakeholders. Based on the research results, it can be stated that the interpretation dimension in the implementation of waste management policies in Bandung Regency has not been fully realized effectively. That is, it has not been done comprehensively, has not been followed by changes in mindset and behavior, and has not established synergistic cooperation between stakeholders. The findings of new concepts, namely community understanding and participation in program implementation, are factors that determine the success of the interpretation dimension in policy implementation.

Keywords: *Interpretation, Implementation, Policy, Waste*

Abstrak

Fenomena pengelolaan masalah persampahan yang belum sesuai harapan, disntaranya disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk, pemahaman aparat yang masih bersifat sektoral, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai dimensi interpretasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini dirancang berdasarkan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan/dokumentasi. Informannya adalah semua pihak yang berkepentingan, baik kalangan aparat pemerintah maupun dari stakeholders lainnya. Berdasarkan hasil penelitian , dapat dikemukakan bahwa dimensi interpretasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, belum sepenuhnya direalisasikan secara efektif. Artinya, belum dilakukan secara komprehensif, belum diikuti perubahan mind set dan perilaku, serta belum terjalannya kerjasama yang sinergis antar stakeholder. Adapun temuan konsep baru, yakni pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, menjadi faktor yang menentukan keberhasilan dimensi interpretasi dalam implementasi kebijakan.

Kata Kunci: *Interprestasi, Implementasi, Kebijakan, Sampah*

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang jumlah produksi, jenis dan kualitas sampahnya selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini seiring dengan pola hidup masyarakat yang cenderung konsumeristis. Kenyataan tersebut, antara lain disebabkan karena sebagian besar masyarakat masih menganggap sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna lagi dan dan tidak bisa dimanfaatkan. Secara strategis dan operasional pengelolaan

ARTIKEL

sampah harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan *reduce* (merubah pola hidup konsumtif), *reuse* (menggunakan kembali bahan-bahan yang berpotensi menjadi sampah), dan *recycle* (mendaur ulang melalui pembuatan kompos).

Masalah dan urusan pengelolaan sampah sebenarnya menjadi tugas bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha (Basriyanta, 1998 : 48). Salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bandung adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Adapun tugas dan wewenang dalam pengelolaan sampah oleh Dinas tersebut, antara lain meliputi : Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah; serta menetapkan lokasi tempat penampungan sementara; tempat pengolahan sampah terpadu dan atau tempat pemrosesan sampah; pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan persampahan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang tersebut, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup terdapat satu bidang yang menagani persampahan, yakni Bidang Pengelolaan Sampah yang terdiri dari 3 (tiga) Seksi, serta 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah, yaitu UPTD Wilayah Soreang, UPTD Wilayah Baleendah, UPTD Wilayah Ciparay, UPTD Wilayah Rancaekek dan UPTD Laboratorium Lingkungan.

Adapun dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, berdasarkan hasil kajian awal ditemukan adanya indikasi permasalahan sebagai berikut : *Pertama*, masih banyaknya petugas yang bersikap lamban dalam memberikan pelayanan terhadap berbagai pengaduan dan keluhan ketidakpuasan masyarakat.. *Kedua*, masalah pelayanan pengelolaan sampah dilihat dari aspek teknis, salah satunya dapat dilihat masih sering ditemukan penumpukan sampah di TPS, sehingga kondisi tersebut jika dibiarkan akan mengganggu keindahan dan kenyamanan. *Ketiga*, dilihat dari sisi pertanggungjawaban, ada persepsi sebagian masyarakat saat ini terhadap pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, yaitu bahwa seolah-olah pengelolaan sampah hanya tanggung jawab pemerintah. Peran masyarakat belum banyak dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan dan monitoring serta evaluasi, padahal masyarakat tidak hanya sebagai tujuan layanan tetapi juga sebagai warga negara yang ikut memiliki dan berkepentingan bersama terhadap sumberdaya dalam pembangunan.

Permasalahan pelayanan tersebut tentu berkaitan dengan banyaknya faktor penentu keberhasilan, dan salah satunya adalah menyangkut dimensi Interpretasi, yang dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut : *Pertama*, persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah, idealnya harus dipahami bukan hanya persoalan dalam hal timbunan sampah atau tempat pembuangan akhir (TPA) saja, tetapi harus dilihat sebagai persoalan multi-pihak. *Kedua*, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah saat ini baru berjalan sebatas kegiatan pengumpulan, pengangkutan dari sumber hingga ke TPS, penampungan sementara, serta pemusnahan sampah. Upaya pemilahan sampah nampak belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan swadaya yang telah dilakukan selama ini pun belum sepenuhnya dijalankan dengan pola yang benar. *Ketiga*, kurangnya komunikasi dan sosialisasi secara intens kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah daerah (Dinas Lingkungan Hidup) mengenai pentingnya pengelolaan sampah.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang kajian, maka penelitian ini memusatkan perhatian pada dimensi interpretasi dalam pengelolaan sampah, yang penulis rumuskan dengan judul : “Interpretasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung”.

B. KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik (*public policy implementattion*) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*). Lebih jauh Jones (1984 : 12) mengartikan implementasi kebijakan publik sebagai : "*getting the job done and doing it*" Namun demikian, menurut Jones bahwa dalam implementasi kebijakan publik menuntut adanya syarat antara lain, adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang mana hal ini sering disebut dengan re-sources. Jones (1984 : 13) merumuskan batasan implementasi sebagai "a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done." Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sum-berdaya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Apa yang dikemukakan oleh Jones tentang implementasi tersebut di atas, merupakan suatu tahap dari suatu kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan; Kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tersebut. Agar dapat terimplementasi dengan baik apa yang menjadi tujuannya seperti yang telah dirumuskan maka kebijakan publik perlu dipersiapkan dengan baik. Keberhasilan implementasi kebijakan itu dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, yang oleh Charles O. Jones (1996 : 296) mengemukakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang menjadi pilar dalam implementasi kebijakan yaitu:

Pengorganisasian (Organization) berhubungan dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit – unit serta metode – metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Interpretasi (Interpretaton) merupakan aktivitas penterjemahan, penafsiran, penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan serta layak dilaksanakan. Sementara itu, aplikasi (Aplication) berhubungan dengan ketentuan rutin penyediaan pelayanan, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Aktivitas interpretasi (Interpretation) merupakan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai tujuan kebijakan, pemerintah harus melakukan tindakan yang berupa penghimpunan sumber serta mengelolanya secara maksimal. Organisasi sebagai wadah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengimplementasikan program, karena itu setiap organisasi membutuhkan kerjasama dalam menggerakkan dirinya, demikian juga pada saat berinteraksi dengan pihak luar. Komunikasi dalam organisasi untuk mencapai kesamaan persepsi. Jones (1984 : 34) berpendapat : Interpretation; The translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives. Maksudnya, bahwa dalam menafsirkan agar suatu program menjadi rencana yang dapat diterima dan jelas dapat dilakukan. Dengan demikian, interpretasi merupakan proses menafsirkan program atau rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Organisasi pemerintah sebagai organisasi pelaksana perlu menginterpretasikan program agar benar-benar operasional serta siap untuk dilaksanakan. Interpretasi menentukan terhadap efektivitas implementasi terutama kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Pemahaman, arahan dan petunjuk yang lengkap serta jelas sangat diperlukan untuk mampu menginterpretasikan dengan tepat. Uraian di atas mengarahkan bahwa aktivitas interpretasi dapat dilihat dari pemahaman terhadap

tujuan, pemahaman terhadap program, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sosialisas, dan pelatihan.

Pelayanan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial warga negaranya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, bahwa "Salah satu fungsi pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai inovator, terutama inovator dalam bidang administrasi negara itu sendiri, yang berarti bahwa produktivitas aparat pemerintah semakin meningkat dan pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan lebih cepat". (Siagian, 1985 : 45).

Dalam pengukuran kualitas pelayanan publik perlu melibatkan masyarakat yang dilayani, adalah tidak mungkin menyatakan suatu jasa pelayanan berkualitas atau tidak berkualitas, tanpa melibatkan penilaian langsung dari masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan pemerintah. Mencermati pandangan ini, maka dalam kontek pelayanan publik dapat digaris bawahi bahwa keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani).

Pada negara-negara berkembang, pembangunan sebagai proses perubahan yang kontinu dari suatu keadaan menjadi keadaan lain yang lebih baik, menunjukkan adanya peran pemerintah yang aktif dan berencana. Keberhasilan program-program pembangunan tersebut, tentunya memerlukan keterlibatan dan dukungan dari seluruh masyarakat yang diwujudkan dalam partisipasi mereka pada setiap kegiatan pembangunan. Pengertian partisipasi sebagaimana dikemukakan Davis & Newstrom (1996 : 179) sebagai berikut : "Partisipasi adalah kesatuan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu". Cohen dan Uffhoff (1977 : 8) mengemukakan bahwa partisipasi terdiri dari :

1. Partisipasi pada tahap pengambilan keputusan
2. Partisipasi pada tahap implementasi program
3. Partisipasi pada tahap pemanfaatan program
4. Partisipasi pada tahap evaluasi program.

Sehubungan dengan kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tersebut, maka bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yakni partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, dan partisipasi harta benda. Dalam hal ini, partisipasi yang dilakukan pada dasarnya, yakni bagaimana suatu proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat terlaksana dan apa saja kontribusi yang diberikan masyarakat untuk terwujudnya tujuan yang diinginkan, yang dalam hal ini tentunya berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sesuai harapan masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan fenomena yang tercermin dalam tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan secara komprehensif, mendalam dan apa adanya tentang bagaimana pelaksanaan dimensi interpretasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian tentang dimensi interpretasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat, sehingga membantu proses interpretasi informasi dan data yang diperoleh. Aktivitas penelitian ini meliputi kegiatan mengumpulkan, menggambarkan, dan menafsirkan data dan situasi yang dialami, hubungan tertentu, kegiatan, pandangan, sikap yang ditunjukkan atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang

berlangsung . (Subagyo, A., Kristian, I., (2023). Dengan metode kualitatif, peneliti berusaha menemukan masalah dan menyajikan secara langsung apa adanya hakikat hubungan antara penulis dan sumber informasi atau informan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Kebijakan, Kelembagaan dan Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung membentuk satu bidang khusus, yakni Bidang Pengelolaan Sampah yang terdiri dari 3 (tiga) Seksi, serta 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah, yaitu UPTD Wilayah Laboratorium Lingkungan, UPTD Soreang, UPTD Wilayah Baleendah, UPTD Wilayah Ciparay dan UPTD Wilayah Rancaekek. Dinas ini merupakan penggabungan dari dua Dinas sebelumnya, yaitu Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dari sudut pandang implementasi kebijakan, bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat tergantung pada kemampuan organisasi pelaksana, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, umumnya berasal dari kegiatan manusia dan bersifat padat. Potensi sampah Kabupaten Bandung merupakan suatu gambaran seberapa besar sampah yang dihasilkan, baik oleh setiap orang atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah di Kabupaten Bandung. Besar potensi sampah tersebut diperoleh dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga (tidak termasuk tinja), sampah spesifik, sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya. Hal ini senada dengan pendapat Hadiwijoto, 1983 : 76), bahwa kategori sumber penghasil sampah adalah 1) sampah domestik, yaitu sampah yang berasal dari pemukiman; 2) sampah komersial, yaitu sampah yang berasal dari lingkungan perdagangan atau jasa komersial berupa toko, pasar, rumah makan, dan kantor; 3) sampah industri, yaitu sampah yang berasal dari suatu proses produksi; dan 4) sampah yang berasal selain dari yang telah disebutkan di atas, misalnya sampah dari pepohonan, sapuan jalan, dan bencana alam. Untuk menanggulangi potensi sampah yang ada di Kabupaten Bandung, maka teknis operasional pengelolaannya dilakukan melalui sistem door to door dan sistem container. Hal ini dikarenakan sistem tersebut mudah, cepat dan murah. Teknis operasional pengelolaan sampah tersebut, meliputi kegiatan :

a. Pengumpulan Sampah

Pada pola operasional *door to door*, pengumpulan dilakukan oleh sumber sampah namun pada pola lainnya dilakukan oleh petugas dengan alat pengumpul gerobag dan pick-up. Alat pengumpulan yang ada saat ini cukup baik, karena mudah dalam operasional dan pemeliharaan, cukup memenuhi syarat kesehatan dan estetika serta terbuat dari bahan yang cukup kuat dan biaya pengadanan terjangkau.

b. Pemandahan Sampah

Pemandahan merupakan tahap sebelum sampah diangkut ke sarana pembuangan atau pengolahan akhir. Sarana pemandahan memiliki fungsi mengurangi ketergantungan antara tahap pengumpulan dan pengangkutan, memperpendek jarak angkut alat pengumpul, memperpendek waktu pemandahan sampah ke truk pengangkut, menghemat jarak angkut dan bahan bakar kendaraan. *Penyimpan sampah* yakni wadah untuk menyimpan sampah sementara dalam jangka waktu tertentu sebelum dibawa ke TPA, yaitu : Container kapasitas ± 6 m³, dengan konstruksi logam yang ditempatkan pada landasan (container point).

c. Pengangkutan Sampah

Sampah harus segera diangkut ke TPA dan tidak boleh tertahan di sumber atau di sarana pemindahan karena alasan estetika dan lingkungan. Diperlukan perencanaan operasional pengangkutan agar berlangsung optimal, mudah, cepat dan biaya operasi relatif ringan. Dalam kegiatan pengangkutan sampah membutuhkan kendaraan operasional pengangkutan yang memperhatikan aspek-aspek material kendaraan sesuai untuk komposisi/karakteristik sampah; rancang bangun kendaraan memudahkan dalam operasi memuat sampah, terutama dari alat pengumpul (gerobag); rancang bangun kendaraan memungkinkan operasi pembongkaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat; mudah dalam perbaikan dan pemeliharaan.

d. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah adalah perlakuan atau tindakan terhadap sampah yang memiliki tujuan untuk dapat memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Berikut uraian mengenai hal-hal yang terkait dengan keempat jenis alternatif pengolahan tersebut. Pengomposan (*Composting*), Pembakar sampah (*Incenerator*), dan Sistem *Open Dumping* dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Pembahasan Tentang Pelaksanaan Dimensi Interpretasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung.

Pelaksanaan dimensi interpretasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Bandung salah satunya dapat dilihat dari komitmen yang kuat dalam pengelolaan persampahan, komunikasi dan kerjasama dengan *stakeholder* dalam usaha peningkatan kebersihan lingkungan. Perang terhadap sampah dicanangkan dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Bandung yang berwawasan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bandung tetap berkomitmen untuk fokus pada permasalahan kebersihan lingkungan termasuk dalam pelayanan pengelolaan sampah.

Kebijakan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung tidak terlepas dari rangkaian asumsi yang digunakan sebagai landasannya. Berdasarkan isi peraturan perundangan yang telah diberlakukan, kerangka pemikiran yang digunakan untuk menetapkan kebijakan pelayanan pengelolaan sampah, yaitu merubah paradigma pengelolaan sampah saat ini yang masih "kumpul-angkut-buang" dan sampah yang masih dianggap sebagai limbah atau musuh yang harus dibuang, menjadi "sampah sebagai sumber daya" yang dapat diolah, sehingga menghasilkan pendapatan dan menjadi peluang kesempatan kerja bagi masyarakat serta meningkatkan minat/peran dunia usaha dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, keberhasilan dimensi interpretasi pelayanan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan peraturan kerja yang tepat dan kemampaun para pengelola dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, sangat penting untuk memberikan perhatian yang besar terhadap kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsisten atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa aspek yang oleh Charles O. Jones (1996 : 296) dikemukakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang menjadi pilar dalam implementasi kebijakan yaitu : 1). *Organization*; 2). *Interpretation*; 3). *Aplication*. Berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada dimensi *Interpretation* (Interpretasi).

Setiap kebijakan yang akan diimplementasikan, perlu diinterpretasikan atau ditafsirkan secara baik dan benar. Interpretasi terhadap suatu kebijakan bertujuan agar tujuan dan sasaran kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan persampahan dapat dipahami serta didukung oleh semua aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Jones (1996 : 296) mengemukakan, bahwa interpretasi sebagai "*The translation of language (often contained in*

a statute) into acceptable and feasible plans and directives". (menafsirkan agar program (serangkaian dalam status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan"). Jadi interpretasi berkaitan erat dengan para pelaksana (*implementors*) untuk memahami apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan yang seharusnya.

Dengan demikian, implementor perlu menginterpretasikan kebijakan untuk dapat dilaksanakan dengan melakukan sinergitas antara pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan pandang dalam memahami kebijakan secara komprehensif baik secara teknis, strategis, maupun operasionalisasinya. Dengan interpretasi, maka dapat diketahui bagaimana aktor pelaksana mampu memahami terhadap tujuan/program, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi, sosialisasi informasi, sikap petugas, ketepatan media, dukungan masyarakat, dan tindak lanjut perbaikan.

Interpretasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat dilihat dari aspek :

Pertama, menyangkut pemahaman terhadap tujuan kebijakan pengelolaan sampah. Secara normatif bahwa tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam pengelolaannya diselenggarakan berdasarkan azas tanggungjawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran hukum, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan asas nilai ekonomi. (Perda Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 pasal 3 ayat 1 dan 2).

Secara mendasar, ada tiga hal penting tentang tujuan pengelolaan sampah, yakni menyangkut peningkatan kebersihan, kesehatan lingkungan dan sumber daya yang dilandasi sembilan azas. Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas program pemerintah daerah dengan tujuan lebih menekankan pada peningkatan kesehatan dan lingkungan, bahkan menurut Kepala UPTD, selain peningkatan kebersihan, kesehatan dan lingkungan, juga menyentuh aspek keindahan, ketertiban, serta kenyamanan dalam mendukung pariwisata. Pemahaman seperti itu bermakna pada skala prioritas yang harus ditangani lebih intens, sehingga pengelolaan sampah mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bandung, baik yang sifatnya langsung dalam pengelolaan untuk pengurangan sampah maupun pada persoalan bagaimana pengelolaan sampah menjadi sumber daya (nilai pemanfaatannya).

Penyusunan tujuan/sasaran kebijakan dapat dilihat sebagai usaha dalam pencapaian tujuan organisasi, yang dibuat secara rinci dengan maksud agar mudah dipahami. Berhasil atau tidaknya kebijakan yang dibuat dapat dipahami dan dijalankan oleh aktor, tentunya tergantung kepada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan. Dari hasil penelitian, terungkap bahwa keberhasilan penyampaian pesan dalam komunikasi, bukan hanya ditentukan oleh ketepatan dan kejelasan dalam menyampaikan pesan, tetapi kompleksitas isi pesan pun perlu diperhatikan yang menyebabkan pesan tidak bisa seluruhnya dapat dipahami. Implikasi lebih lanjut adalah terjadinya bias dalam memaknai isi kebijakan yang tentunya akan menimbulkan mis-interpretasi terhadap kebijakan persampahan.

Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan adanya perbedaan cara pandang terhadap masalah persampahan. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari masih relatif terbatasnya pemahaman aparat dan masyarakat, bahwa penanganan sampah cenderung bersifat sektoral dan parsial. Jika dicermati dari sisi harapan publik, jelas bahwa pengelolaan sampah belum sepenuhnya memenuhi harapan publik, sistem pengelolaan juga tidak dipandang sederhana, hal ini disebabkan salah satunya interpretasi yang keliru dalam memahami problem persampahan. Seperti disampaikan oleh Wibawa (1994 : 19), bahwa "Isi suatu kebijakan harus menegaskan standar dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan". Hal ini memerlukan adanya ketegasan, karena tingkat kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan tujuan, sehingga dapat disajikan pedoman untuk mengevaluasi apakah suatu kebijakan itu berhasil atau mengalami kegagalan.

Kedua, Pemahaman terhadap peran dan tupoksi. Tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah dijabarkan dalam berbagai strategi, program dan rencana aksi mengenai bagaimana pengelolaan sampah di lapangan dari mulai hulu hingga ke hilir. Ini semua memerlukan pemahaman, dukungan dan komitmen yang tinggi dari seluruh aparat terkait. Namun sayangnya, tugas yang kompleks ini belum diimbangi oleh petugas yang handal yang mampu memahami, menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sampah yang dari waktu ke waktu semakin meluas.

Dengan mencermati kondisi tersebut, kualitas sumber daya manusia ditinjau dari kemampuan pengetahuan dengan kompetensi dalam pengelolaan sampah (latar belakang pendidikan/pengetahuan) masih sangat variatif. Selain itu, secara kuantitas jumlah tenaga terampil di bidang operasional masih belum memadai. Jumlah pegawai yang berada di level operasional yang menguasai dan memahami tentang teknis pengumpulan sampah, pemindahan dan pengangkutan, pengurangan sampah skala rumah tangga, skala lingkungan, pemrosesan akhir, serta teknis perbengkelan, sarana pengolahan sampah, masih relatif terbatas. Dari informasi tersebut memberi makna, bahwa persoalan pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan peran yang harus dijalankan petugas amat penting, karena walau bagaimanapun aparat dalam melakukan pekerjaan, sangat ditentukan oleh pemahaman dan komitmen yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta tanggungjawabnya.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tanggapan informan terhadap perubahan peran, fungsi dan misi dalam pengelolaan sampah sebenarnya belum banyak dipahami dan dihayati oleh semua aparat terkait sebagai sebuah perubahan yang substansial. Adanya perubahan pada struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan prosedur teknis yang diberlakukan dalam era otonomi ini, belum berimplikasi pada perubahan nilai dan orientasi dalam memperbaiki *mind set*, sikap dan kinerja organisasi. Adanya sikap egosektoral dan perbedaan kepentingan antara pihak terkait, serta semakin kompleksnya *problem* yang dihadapi, sebagai suatu cerminan masih adanya kesalahpahaman (*mis-perception*) dalam memahami substansi kebijakan dalam pengelolaan sampah.

Ketiga, Pemahaman terhadap program dan sosialisasi Implementasi kebijakan dapat direalisasikan melalui program kerja yang tentunya memerlukan sosialisasi melalui berbagai jaringan komunikasi sebagai informasi. Yang menjadi persoalan, ternyata tidak semua program, termasuk pengelolaan sampah yang diimplementasikan dalam masyarakat, dapat berjalan dan dapat diterima sebagaimana mestinya. Tidak sedikit implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang tidak mendapat dukungan dari lingkungan masyarakat, karena masalah pemahaman dan kesadaran masyarakat, sehingga penanganan sampah tidak terkelola dengan baik. Misalnya bagaimana kebiasaan masyarakat dalam bentuk perilaku hidup sehat dan bersih masih cukup memprihatinkan.

Upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat peduli terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan serta mengurangi kebiasaan buruk memperlakukan sampah adalah dengan mensosialisasikan informasi kebijakan pengelolaan sampah. Informasi berkenaan dengan implementasi pengelolaan sampah ini penting, berkaitan dengan soal kesadaran masyarakat terutama dalam hal pembuangan sampah. Dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya, atau buang sampah sembarangan. Fenomena ini terkait dengan minimnya pemahaman mereka dan kesadaran akan akibat membuang sampah sembarangan ke sungai, tanah lapang yang tidak terpakai, atau ke pinggir jalan. Dari hasil wawancara dengan informan menunjukkan, bahwa : "Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya relatif minim, hal ini bisa jadi karena : *pertama*, mereka kurang paham akan akibat dari kebiasaan tersebut; *kedua*, menyangkut persepsi bahwa seolah-olah masalah sampah adalah urusan pemerintah, karena

mereka menganggap sudah membayar retribusi; dan *ketiga*, tidak adanya sanksi bagi mereka yang melanggar”.

Melihat kondisi tersebut, maka sudah saatnya pemerintah daerah mengintensifkan upaya mensosialisasikan berbagai informasi, pesan dan kebijakan terhadap seluruh komponen *stakeholder* terutama pada masyarakat sebagai produsen sampah, sehingga penanganan sampah tidak hanya mengandalkan petugas saja. Dengan demikian jelaslah bahwa banyak informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat merupakan sesuatu hal yang penting dalam upaya menciptakan pemahaman masyarakat tentang bagaimana sampah seharusnya dikelola dengan baik. Selama ini pemerintah Kabupaten Bandung dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut dilakukan melalui media papan nama, pemberitaan di media massa, media elektronik dan sosialisasi kepada warga secara langsung melalui pertemuan.

Visi misi Kabupaten Bandung yang menjadi arah, dan orientasi kebijakan Kabupaten Bandung ke depan, seyogyanya menjadi pegangan bagi setiap aparat maupun pejabat dalam merumuskan program, mengimplementasikan kebijakan serta langkah operasional agar ada keselarasan. Keselarasan program pada visi misi tersebut sangat bergantung pada pemahaman aparat dan masyarakat dalam memaknai serta konsistensi dalam menjalankan misi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian kaitannya dengan masalah kebersihan, menunjukkan bahwa aparat pemerintah umumnya tidak begitu peduli terhadap makna yang tertera dalam visi dan misi Kabupaten Bandung, karena semuanya dipandang memiliki tujuan yang baik.

E. SIMPULAN

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka, dapat disimpulkan bahwa dimensi interpretasi dalam pengelolaan sampah, ternyata belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari : Interpretasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang menyangkut pemahaman dalam menafsirkan substansi dan tujuan kebijakan serta program pengelolaan sampah, baik aparat maupun masyarakat masih rendah. Pada tingkat aparat, bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum merubah mind set, sikap, nilai serta masih melekatnya sikap egosektoral antar pihak terkait. Pada tingkat masyarakat, masih ada bias dalam memahami masalah sampah dan tanggungjawab pengelolaan sampah yang dipandang sebagai urusan pemerintah semata. Sampah lebih dipandang sebagai barang sisa, belum banyak dilihat sebagai sumber daya ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kesehatan. Pola pembinaan dan sosialisasi untuk memacu kesadaran dan partisipasi masyarakat dilaksanakan secara insidental.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Subagyo, A., IP, S., Kristian, I., IP, S., & Kom, S. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Aksara Global Akademia.
- Goggin, Malcolm L., and O.M. Bowman, James P. Lester and Lawrence J.O. Toole. 1990. *Implementation Theory and Practice : Toward a Third Generation Scoot*. Foresman and Company. Illions.
- Hadiwijoto S. 1983. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta : Yayasan Idayu.
- H.S, Y. T., & Kristian , I. (2021). Model *Collaborative* dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Garut. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(3), 69–81.
- Jones, Charles O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey, California : Brooks/Cole Publishing Company.

ARTIKEL

- Kristian, I. (2022). Decision Making in Disaster Management Operations: Challenges and Opportunities. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 4(2), 82-91.
- Siagian, Sondang P. 1985. *Analisis Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*. Jakarta : CV Haji Masagung.
- Sidik, M.A., Herumartono,D. & Sutanto,H. 1985. *Teknologi Pemusnahan Sampah dengan Incenerator dan Landfill*. Jakarta : BPPT.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Jakarta : Media.
- Zeithaml, Valerie A; Parasuraman, A. And Barry, Leonard L. 1990. *Delivering Quality Service (Balancing Customer Perception and Expectations)*. New York-Oxford-Sidney : The Free Press A Division of Macmillan Inc.